

**PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DALAM PERKAWINAN (STUDI DI KANTOR
BP4 KECAMATAN GEMOLONG
KABUPATEN SRAGEN)**



NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

INDRA WAHYUDI

C 100 080 174

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013**

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dosen pembimbing naskah publikasi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Darsono, S.H., M.Hum)

Pembimbing II



(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchammad Iksan, S.H., M.H)

ABSTRAK

Indra Wahyudi. PERANAN BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM PERKAWINAN (STUDI DI KANTOR BP4 KECAMATAN GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN): Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret 2013.

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut: 1. Ingin mengetahui bagaimana peran petugas BP4 dalam penyelesaian perselisihan dalam perkawinan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Dan 2. Untuk mengetahui problem dan hambatan petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Bentuk penelitian dalam skripsi ini adalah hukum normatif yang ditunjang dengan data dari referensi. Sedangkan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah petugas BP4 di Kantor BP4 Kecamatan Gemolong dan klien yang mengalami permasalahan dalam perkawinannya.

Dalam pengumpulan data, metode yang dipergunakan teknik wawancara dan teknik observasi serta dokumentasi. Untuk menguji validitas data dipergunakan teknik triangulasi data, triangulasi teori, dan informan review. Analisis data ditempuh dengan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran Kasus-kasus Pernikahan Perselisihan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, dalam penelitian ini adalah, dari lima kasus sengketa pernikahan perselisihan pernikahan, disebabkan karena masing-masing pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurang ada komunikasi. Dari lima kasus yang ada, empat kasus dapat diselesaikan dengan jalan mediasi dan musyawarah dari masing-masing pihak dengan mediator, sedangkan satu kasus diselesaikan melalui Pengadilan Agama (kasus yang terselesaikan ada 80 %)
2. Peran BP 4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Dalam Penyelesaian Perselisihan pernikahan adalah, pertama, BP 4 bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, BP 4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah
3. Hambatan yang dialami petugas BP 4 dalam menjalankan tugas dan perannya antara lain:
 - a. Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 di Kecamatan Gemolong dan tidak proaktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan.
 - b. Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan.
 - c. Factor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri).
 - d. Para petugas BP 4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola.

PENDAHULUAN

Bagi masyarakat modern, proses sekularisasi yang ditandai dengan industrialisasi sebagai proses yang berdampak pada perubahan sosial dan budaya, menjadi tidak terelakkan. Modernisasi juga merupakan salah satu model kehidupan manusia yang memiliki ciri tertentu, yang ditandai dengan pesatnya kebutuhan manusia terhadap materi, bahkan dapat menjadi ajang persaingan kepentingan manusia. Modernisasi ditandai dengan kemajuan teknologi, industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi kultur serta tersentralkannya arus wacana kepada kepentingan dominasi informasi¹. Namun sisi positifnya adalah memberikan kemudahan-kemudahan pada manusia dalam segala aspeknya.

Memang dengan prinsip dan logika kebendaan sebagai dasar paradigma kemodernan, maka manusia dapat meraih kemewahan sesuai dengan yang diinginkannya. Namun kemewahan tersebut justru sering menghilangkan orientasi hidup manusia sebagai makhluk sosial yang akan mengakibatkan kejenuhan dalam menghadapi kehidupan ini, bahkan manusia malah kehilangan kesyahduan hidup, seni menghormati hidup dan kehidupan makhluk lain dan krisis identitas diri. Dan sebaliknya justru kerinduan akan ketentraman batin dan dambaan akan kebahagiaan jiwa semakin dicari oleh banyak orang.

Menghadapi kompleksitas dalam kehidupan modern dan tantangan-tantangan besar kehidupan modern bagi manusia dalam masyarakat. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat harus memiliki ketahanan dan kemampuan yang tangguh, sehingga tidak mudah terpengaruh dampak negatif dari kehidupan modern. Pada saat ini banyak dijumpai sebuah keluarga secara material berkecukupan, namun secara spiritual tidak menemukan kebahagiaan hidup.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dibawah naungan Departemen Agama dengan SK Menag No.85 tahun 1961, dengan tugas-tugasnya, berusaha mengantisipasi hal-hal tersebut diatas². Misi BP4 pada masa lalu adalah untuk menurunkan tingkat perceraian dan misi ini telah diembannya dengan baik, namun ketika dampak era globalisasi merambah pada lapisan masyarakat, maka

¹ Mulyadi, 2005, hlm.1. Peranan Petugas BP4 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Surakarta, Surakarta : UMS.

² Depag RI, 2004, hlm.5. *Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta; Depag,

misi lama BP4 tersebut harus didefinisikan kembali dalam konteks baru, yakni petugas BP4 harus mampu mengatasi problem keluarga sebagai dampak negatif era globalisasi dan kemodernan³.

Kita tidak bisa menutup mata, bahwa permasalahan keluarga bisa muncul setiap saat, apakah berkaitan dengan hubungan tidak harmonis antara suami-istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak, semuanya memerlukan penanganan khusus⁴. Alangkah baiknya bila permasalahan itu bisa ditangani sendiri oleh yang bersangkutan, namun bila tidak, ajaran Islam menganjurkan untuk mencari juru damai atau hakim, yang tentu saja tidak memihak salah satunya.

Hakam sebaiknya dari keluarga sendiri, akan tetapi apabila tidak, mereka bisa memanfaatkan BP4, hanya saja dengan perkembangan dan meningkatnya pendidikan masyarakat serta bergesernya pandangan orang terhadap keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, serta permasalahan kompleks lainnya, maka petugas BP4 harus membekali diri dengan kemampuan, tidak hanya pemahaman keagamaan yang mendalam, akan tetapi juga kemampuan konseling dan psikoterapi yang cukup memadai.

Mangapa penelitian harus diarahkan dalam konteks lokasi Kecamatan Gemolong Sragen, Pertama, Kecamatan Gemolong adalah wilayah domisili dan diharapkan hasil penelitian sebagai kontribusi atas problem krusial yang dihadapi. Kedua ,tingkat perselisihan dan ketidak harmonisan dalam keluarga bermunculan, tingkat keberadaan yang variatif dan tingkat pendidikan sangat plural.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat urgen sekali dirumuskan peran BP4 dalam penyelesaian dalam perkawinan, yakni peran yang diarahkan dalam penyelesaian perselisihan perkawinan sehingga terciptanya keluarga sakinah. Problem-problem tersebut secara implisit dijumpai di kecamatan Gemolong dengan indikasi tinggi atau rendahnya tingkat hubungan keluarga kurang harmonis dan perselisihan dalam keluarga yang mengarah pada penganiayaan dan perceraian.

³ Nur Salim. 2009. hlm.8. *Pesan Ayah Kepada Putrinya yang akan Menikah*. Sragen: BP4 Kecamatan Gemolong.

⁴ Patih Zati. 2011. hlm.5. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari segi bidang ilmu dan sumber data, penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu; penelitian dibidang hukum yang mempunyai sumber data berasal dari perilaku anggota masyarakat, terutama pegawai BP 4 dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan permasalahan perkawinan yang harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu; penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lain.⁵ Penelitian ini memberikan gambaran yang lengkap mengenai peran petugas BP4 dalam penyelesaian perselisihan dalam perkawinan di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kantor BP4 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi objek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa keterangan atau fakta-fakta⁶. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan petugas BP 4 dan juga pasangan suami istri yang mengalami perselisihan dalam keluarga.

Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen yang ada dipustaka dan kantor BP4 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi kepustakaan

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm.10

⁶ *Ibid.*, hal.12.

Merupakan metode dengan jalan mencari keterangan-keterangan, teori-teori dan data lain yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini melalui buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan.

Wawancara atau interview

Yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan secara lesan dari responden dengan cara berbicara langsung dengan responden tersebut. Penulis mengadakan komunikasi langsung dengan responden secara bebas terarah menggunakan instrumen berupa daftar pertanyaan sehingga data yang diperoleh tidak terlalu luas dan dapat di analisis guna menjawab perumusan masalah.

Setelah data terkumpul dan dirasa lengkap, lalu diadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yang meliputi reduksi data penyajian dan menarik kesimpulan⁷.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Adapun peranan BP 4 dalam penyelesaian sengketa pernikahan perselisihan pernikahan adalah: BP 4 bertindak sebagai konsultan pernikahan, dengan jalan memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali, dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Gemolong . BP 4 bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui taukil wali, baik itu taukil dengan lisan, maupun taukil dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), untuk taukil melalui surat kuasa biasanya terjadi karena wali tidak hadir dalam acara pencatatan nikah , namun apabila wali dapat hadir dalam pencatatan nikah , maka wali cukup mengikrarkan mewakilkan menikahkan calon mempelai (taukil) kepada BP 4. BP 4 bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah BP 4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah, namun di sisi lain berperan sebagai wali, yaitu wali hakim. Wali hakim dapat

⁷ Miles, Mathew B dan Amicahel Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta : Universitas Indonesia. 2007. hlm.20

dilaksanakan karena wali nikah (wali nasab, wali akrob) tidak hadir dalam pencatatan nikah karena adlal, dan adlalnya wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2. Dari lima kasus yang ditangani oleh BP4 yang dapat rujuk kembali dan semua pihak menerima bersatunya kembali keluarga yang dibina (tak terjadi perceraian ada 4 kasus (80 %) dan yang proses peceraian berlanjut ada 1 kasus (20 %)).

Untuk memahami hambatan dalam menjalankan tugas dan peran BP 4 untuk membantu penyelesaian permasalahan perkawinan dilakukan wawancara dengan Ketua BP 4 Kecamatan Gemolong. Secara garis besar hambatan yang dirasakan oleh petugas BP4 dalam menjalankan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 di Kecamatan Gemolong dan tidak proaktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan sehingga dapat dibantu untuk diselesaikan. Hal ini terjadi karena petugas BP 4 juga merangkap sebagai petugas pencatat nikah sehingga peran BP 4 hanya terlihat pada saat rapak dan saat selesai akad nikah dengan memberikan nasihat pada mempelai berdua.
2. Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. Dalam hal permasalahan perkawinan juga demikian, apabila suatu keluarga terjadi perselisihan yang akhirnya berujung pada perceraian mereka juga ingin yang instan yakni dengan menyewa pengacara untuk menyelesaikan untuk perceraianya. Dengan membayar pengacara ia ingin masalahnya segera selesai tanpa harus ribet memikirkannya.
3. Factor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). Akibat dari pasal 25 UU No. 1 tahun 1974 tersebut adalah apabila sebuah keluarga mengalami permasalahan dan berujung pada perceraian maka pihak yang bermasalah dapat langsung ke Pengadilan Negeri tanpa harus datang ke KUA dimana akad nikahnya dilangsungkan sebagai BP 4 yang pasif cenderung tidak akan memahami berbagai kasus yang ada di daerah binaannya tersebut.

4. Para petgas BP 4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petuags hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola, padahal berdasarkan pasal 25 UU tersebut di atas bola tak akan datang ke kantor BP4 apabila sebuah perkawinan mengalami pembatalan perkawinan namun datangnya ke pengadilan negeri.

SIMPULAN

Gambaran Kasus-kasus Pernikahan Perselisihan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong, dalam penelitian ini adalah, dari lima kasus sengketa pernikahan perselisihan pernikahan, disebabkan karena masing-masing pihak tidak memahami tentang peran dan tugas serta kewajibannya sehingga kurang ada komunikasi. Dari lima kasus yang ada, empat kasus dapat diselesaikan dengan jalan mediasi dan musyawarah dari masing-masing pihak dengan mediator, sedangkan satu kasus diselesaikan melalui Pengadilan Agama (kasus yang terselesaikan ada 80 %)

Peran BP 4 Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemolong Dalam Penyelesaian Perselisihan pernikahan adalah, pertama, BP 4 bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, BP 4 berperan sebagai Pegawai Pencatat Nikah

Hambatan yang dialami petugas BP 4 dalam menjalankan tugas dan perannya antara lain: 1. Adanya kecenderungan petugas BP4 untuk menunggu kasus perceraian datang ke kantor BP4 di Kecamatan Gemolong dan tidak proaktif untuk mencari keluarga siapa yang mengalami permasalahan. 2. Masyarakat sekarang cenderung memiliki gaya hidup yang instan dalam segala permasalahan kehidupan. 3. Factor lain adalah terbitnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 25 yang menyatakan Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (pengadilan Negeri). 4. Para petgas BP 4 cenderung bersifat pasif yang artinya akan membantu menyelesaikan permasalahan perkawinan bagi mereka yang datang padanya sehingga petugas hanya menunggu datangnya bola bukan menjemput bola.

DAFTAR PUSTAKA

- Depag RI. 2006. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam.
- H.B. Sutopo. 2003 *Konsep-Konsep Dasar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS
<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/412-memaksimalkan-peran-dan-fungsi-bp4.html> diakses pada 27 Januari Pukul 16.20 WIB
- Khollillah Marhijanto, tth. *Menciptakan Keluarga Sakinah*. Gresik : Bintang Pelajar
- L.J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Karya.
- Marzuki, 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. BPFE – UII.
- Miles, Mathew B dan Amicahel Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode – Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Muhammadi Nabil Kazhim, 2007. *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*. Solo: Samudera.
- Muhammad Nursalim, 2009. *Pesan Ayah Kepada Putrinya yang akan Menikah*. Sragen: BP4 Kecamatan Gemolong.
- Mulyadi, 2005. *Peranan Petugas BP4 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Di Kota Surakarta*. Surakarta: UMS
- Nasution. 2003. *Metode Research*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Pakih Sati, 2011. *Panduan Lengkap Pernikahan*. Jogjakarta: Bening.
- Ridwan Rahadiyanto, 2012. *Skype (Telepon, Video Call dan Pesan Instan Gratis Melalui Internet*. Yogyakarta; Andi.
- Sayuyib Sabiq, 2012. *Fiqih Sunnah jilid 6 dan 7*. Bandung: Alma'arif.
- Singgih D Gunarso, 2003. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrai*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Surya Brata, 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sugiri Syarief, 2007. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*, Jakarta : Mitra Abadi Press.
- Syamsudin Nur, Mutia Mutmainah, 2007. *Perkawinan yang didambakan menurut Al - Qur'an dan As – Sunnah*, Jakarta : An Nur Press.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Sudarwan Danim, 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.

Sutrisno Hadi. 1991. *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada.